

## ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN - PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP PEMALANG NO. 41, BD. 2012/NO. 41, 58 HAL

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibuat petunjuk pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pematang tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 9 Tahun 2010; Permendagri No. 11 Tahun 2010; Permendagri No. 19 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengatruannya. Diatur pula tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Mekanisme Pengenaan Sanksi Administrasi, Penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, Bentuk dan Tata Naskah Formulir, Bentuk Tanda Pembayaran Denda, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Agustus 2012